BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena keterbelakangan dan ketertinggalan pembangunan akhir-akhir ini telah menjadi sorotan dari semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah bahkan memasukkan agenda pembangunan ke dalam skala prioritas. Fokus pemerintah untuk memajukan pembangunan terutama pada daerah tertinggal saat inisangat intens dilakukan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas kesehatan, fasilitas umum, fasilitas pendidikan bahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Pembangunan tentu tidak cukup hanya di dimaknai sebagai manifestasi perubahan yang bersifat *physical* akan tetapi lebih dari itupembangunan mengandung substansi nilai (*values*) yang memiliki tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan konsepsi yang terkandung dalam sila ke lima Pancasila.

Pembangunan merefleksikan perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan atau kondisi sebelumnya. Perubahan keadaan ini tentu hanya bisa terwujud jika pembangunan di jalankan secara berkelanjutan dan konsisten, upaya mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat juga menjadi hal yang harus dan wajib di tuangkan dalam tujuan utama pembangunan. Substansi dari pembangunan harus berpihak dan berpijak pada upaya untuk mewujudkan

kesejahteraan bagi masyarakat. Arah dan tujuan dari pembangunan harus didasarkan pada pemeliharaan dan perhatian pada aspek kehidupan yang beragam, dengan begitu cara-cara atau metode yang digunakan harus mampu mewujudkan implementasi hukum yang dapat dipercaya bersangkutan dengan kelembagaan serta dapat memiliki peran yang aktif, transparan, efisien, serta adil. Dasar-dasar ide tentang pembangunan harus disesuaikan dengan upaya mewujudkan cita-cita yang berkeadilan untuk kehidupan sosial, dengan begitu pembangunan membutuhkan tahap-tahap dan proses yang tepat. Tahap-tahap tersebut hendaknya mampu berimplikasi segala bidang baik itu ukuran kemampuan materiil yakni ekonomi serta keadilan sosial sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial masyarakat. Oleh karena itu para perumus kebijakan dan ahli dalam pembangunan harus memberikan Perhatian lebih terhadap unsur nilai pada pembangunan mulai dari pilihan epistimologis-ontologis juga derivasinya pada tingkat strategi, program, dan proyek (Digdowiseiso, 2019:6).

Pada proses ini tentu kita ingin mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan pembangunan. Secara umum pembangunan dapat mendefinisikan pembangunan adalah satu tahapan dan proses yang terencanaa oleh orang atau kelompok yang berwenang dalam hal terkait pembangunan sebagai langkah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat melalui perubahan yang dilakukan secara terus menerus. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup menjadi lebih baik demi tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup, kebutuhan masyarakat harus tersedia dengan memproduksi barang dan jasa, (Fauzi dalam Sunarto, 2016:1).

Siagian (dalam Wigdowiseiso, 2019:7) memberikan narasi-narasi untuk mengartikan pembangunan merupakan upaya dalam merangkai perubahan dan pertumbuhan secara terencana dan dilaksanakan dengan kesadaran yang tinggi oleh suatu bangsa, pemeritah atau Negara untuk memodernasi hal yang terkait dengan cara membina bangsa (*nation* building). Adapun Kartasasmita (1994) mengartikan pembangunan lebih sederhana, yakni satu tahapan dan proses yang terencana untuk memperbaiki aspek-aspek menjadi lebih baik melalui proses perubahan yang berkelanjutan.

Menurut Bryant dan White (dalam Rakhmat, 2013:3) Pembangunan juga didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan demi terwujudnya peningkatan pada kemampuan individu dalam meraih masa depannya terutama berkaitan dengan lima dampak pokok yakni (1) pembangunan bermakna menghidupkan kembali kemampuan yang dimiliki individu secara efektif entah itu kelompok atau individu. (2) pembangunan bermakna upaya untuk menumbuhkan kesejahteraan, kebersamaan nilai dan kemerataan nilai. (3) pembangunan bermakna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarak dalam rangka mengembangkan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kemampuan yang ada pada invidu tersebut. Kepercayaan ini diwujudkan menjadi kesempatan yang setara, serta kebebasan untuk memutuskan serta kebebasan untuk memilih. (5) pembangunan bermakna mereduksi ketergantungan bangsa yang satu kepada bangsa lain, mengembangkan relasi yang mutualisme dan saling menghormati.

Pembangunan yang merupakan suatu bentuk perubahan, berupaya untuk terwujudnya suatu keadaan hidup dalam masyarakat dan Negara menjadi lebih maju dan berkembang dari kondisi sebelumnya, adapun peran pembangunan

menjadi satu pertumbuhan direalisasikan melalui pengembangan kemampuan individu atau kelompok secara kuantitatif maupun kualitatif . Dengan begitu pembangunan secara prinsipal merupakan bagian dari pertumbuhan, yakni pembangunan adalah dapat menyebabkan pertumbuhan dan pertumbuhan akan hadir sebagai dampak dari adanya proses pembangunan. Atas dasar itu, pertumbuhan dapat dilihat dari seberapa optimal upaya mengembangkan dan usaha memperluas serta meningkatkan aktivitas positif dalam masayarakat (Siagian, 1983).

Wigdowiseiso (2019:12) menyatakan bahwa sisi *values* pada individu didasarkan pada nilai-nilai atau norma-norma kemanusiaan menciptakan suasana perasaan yang menjunjung tinggi harga diri dan menghormati diri sendiri serta tidak diperalat orang lain, serta merasa bebas dan merdeka dari perbudakan dan penjajahan. Di samping itu, arti terdalam dari pembangunan iyalah ketika individu untuk menentukan masa depannya entah itu keadilan, kapasitas, wewenang, kuasa dan saling ketergantungan.

Setelah mendalami definisi dan konsep pembangunan diatas, telah disebutkan bahwa pembangunan saat ini juga menaruh fokus terhadap pembangunan daerah tertinggal dan terbelakang, pembangunan juga harus menyentuh semua stratifikasi administrasi pemerintahan dari tingkat desa hingga pembangunan dalam kacamata nasional. Menurut hasil IPD (indeks pembangunan desa) tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, terdapat 5.606 Desa mandiri, 14.461 Desa tertinggal, dan 55.369 Desa berkembang. Jumlah Desa tertinggal masih menunjukkan persentase yang belum memuaskan, oleh karena itu pemerintah dan masyarakat harus menaruh fokus pada pembangunan Desa

terutama Desa yang digolongkan sebagai Desa tertinggal. Keberhasilan pembangunan nasional tentu harus dimulai dengan pembangunan dari bawah terlebih dahulu. Desa merupakan unit administrasi terkecil dalam suatu pemerintahan. Pemerintah menaruh perhatian penting terkait pembangunan daerah terutama desa. Komitmen pemerintah dalam membangun daerah pedesaan dimanifestasikan melalui berlakunya Undang- undang Desa No 6 Tahun 2014.

Dalam pasal 1 ayat 8 UU Desa No 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pembangunan desa merupakan suatu proses peningkatan *standard of living* dan kehidupan demi kesejahteraan masyarakat desa yang sebesar besarnya. Suseno (2016:1) menjelaskan pemberlakuan UU Desa No 6 Tahun 2014, turut serta menimbulkan berbagai pengaruh. Terjadi *changes* yang fundamental bagi kelurahan atau desa yang berhubungan dengan UU Desa No 6 Tahun 2014, Yakni antara lain :

a. Kelurahan dan desa memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Desa yakni:
   1) *Planning* Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dengan jangka waktu (6) tahun
   2) *Planning* Pembangunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang digunakan dalam mendeskripsikan RPJMD dengan jangka waktu (1) tahun
b. RKPD ataupun RPJMD yang telah disusun wajib berlandaskan pada RPK (rencana pembangunan kota/kabupaten).

c. Dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Desa, masyarakat wajib ikut serta dan terlibat dalam kegaiatan yang disebut sebagai (Musrengbangdes)

d. Dalam merencanakan Pembangunan Desa, wajib mengacu pada kebutuhan masyarakat desa seperti yang termaktub pada UU No 6 Tahun 2014

e. Rencana pembangunan desa hendaknya berorientasi dan bertujuan untuk:

   a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
   b. Pengembangan dan peningkatan *standard of living*
   c. Pengurangan masyarakat miskin dengan memenuhi segala bentuk kebutuhan pokok
   d. Penyediaan fasilitas penunjang desa
   e. Peningkatan dan pengembangan sektor ekonomi tradisionak kemasyarakatan
   f. Pemanfaatan *resources* secara maksimal

Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah desa atau perangkat desa berlandaskan UU Desa No 6 Tahun 2014 merupakan suatu yang tergolong baru dan dalam proses impelementasinya akan banyak menciptakan hambatan dan halangan. Di satu sisi penerapan UU ini telah terlaksana pada tahun 2015, oleh karena itu kelurahan atau desa diwajibkan untuk menerapkannya termasuk dalam hal ini kewajiban dalm hal penyusunan RPD (rencana pembangunan desa).

Bertolak pada orientasi atau tujuan Rencana Pembangunan Desa Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014 poin ke 4 tentang pembangunan sarana dan prasarana desa, maka dalam hal ini Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah merealisasikan orientasi atau tujuan tersebut dengan membangun sarana dan prasarana desa yakni Taman Olahraga Madani sebagai salah satu manifestasi dari Rencana Pembangunan Desa yang tertuang dalam Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014. Pembangunan fasilitas publik ini tentu merupakan hal yang sangat bagus dan perlu diapresiasi untuk mengembangkan kualitas hidup masayarakat desa Selebung pada khususnya. Implikasi pembangunan tidak hanya berwujud kemudahan dalam memperoleh tempat olahraga untuk kesehatan tubuh, akan tetapi Taman Olahraga Madani yang terdiri dari lapangan futsal, lapangan bulutangkis, lapangan voli dan run track ini juga disiapkan pemerintah Desa Selebung sebagai sarana untuk mangakomodasi talenta dan bakat masyarakat khususnya kaum pemuda yang ingin mengembangkan talenta dan bakat mereka dalam dunia olahraga baik futsal, voli, lari, atau bulutangkis. Penerimaan dan antusiasme masyarakat menunjukkan kepuasan mereka terhadap pembangunan Taman Olahraga Madani ini. Dalam rangka mendukung penerapan dan pelaksanaan kegiatan keolahragaan, pemerintah desa Selebung sudah memetakan rencana penyelenggaraan even-even atau pertandingan- pertandingan yang akan segara dilaksanakan. Tentu dengan begitu pembangunan sarana ini juga akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa Selebung ke depannya.

Merujuk pada tinjauan awal yang dilaksanakan di sekitar Taman Olahraga Madani, pembangunan Taman Olahraga Madani sangat berimplikasi bagi

masyarakat desa Selebung. Fenomena yang menunjukkan keberhasilan realisasi Rencana Pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Selebung tidak hanya terwujud dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tetapi yang paling penting dari itu juga munculnya kegiatan ekonomi yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa Selebung. Berdasarkan data yang didapatkan dari pemerintah Desa Selebung, terdapat beberapa pelaku ekonomi yang memperoleh pendapatan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan di sekitar Taman Olahraga Madani. Adapun pendapatan yang didapatkan pelaku ekonomi berkisar antara 50.000 rupiah sampai 1.300.000 rupiah.

Pola kegiatan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan pendapatan ini tentu merupakan indikasi dampak dari pembangunan Taman Olahraga Madani. Peneliti dalam hal ini berfokus pada dampak ekonomi yang menjadi manifestasi pembangunan sarana desa yakni Taman Olahraga Madani. Bertolak pada fenomena ekonomi di atas dan alasan-alasan yang mendukung, peneliti menaruh minat untuk meneliti dan mangkaji pengaruh pembangunan sarana desa ini terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan demikian peneliti mengajukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pembangunan Taman Olahraga Madani Terhadap Pendapatan Masyarakat di Desa Selebung Kabupaten Lombok Tengah “.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang yang sudah diuraikan oleh peneliti di atas, terdapat beberapa masalah dan fenomena ekonomi yang terjadi setelah pembangunan Taman Olahraga Madani dilaksanakan. Adapun masalah-masalah dan fenomena-fenomena yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Menurut hasil IPD (indeks pembangunan desa) tahun 2021, jumlah desa tertinggal masih menunjukkan presentase yang masih signifikan, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah pedesaan masih belum merata.

2. Rendahnya aktivitas ekonomi masyarakat di desa Selebung sebelum Taman Olahraga Madani dibangun

3. Rendahnya pendapatan masyarakat di desa Selebung sebelum dilakukannya pembangunan Taman Olahraga Madani yang berada dibawah rata-rata pendapatan perkapita masyarakat di Kecamatan Batukliang yang berada pada angka Rp 1.168.509,10.

4. Kurang tersedianya tempat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan even-even keolahragaan, kesenian, dan ekonomi sebelum Taman Olahraga Madani didirikan. Menurut data BPS kabupaten Lombok Tengah,khususnya di kecamatan Batukliang hanya terdapat satu tempat kegiatan ekonomi yakni pasar Barabali.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar terhindar dari pelebaran tafsir, maka pada riset ini diberikan pembatasan masalah yang bertujuan agar pembahasan tidak melebar, terukur, sistematis dan memiliki kedalaman pembahasan yang efektif. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini adalah : Peneliti hanya mengkaji dan mengidentifikasi fenomena ekonomi sebagai dampak dari pembangunan Taman Olahraga madani.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah yang ditentukan peneliti pada riset ini yakni:

1. Apakah terdapat pengaruh pembangunan Taman Olahraga Madani terhadap pendapatan masyarakat di Desa Selebung ?
2. Berapa besarnya pengaruh Pembangunan Taman Olahraga Madani terhadap pendapatan masayarakat masyarakat di Desa Selebung?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan dari riset ini yakni:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembangunan Taman Olahraga Madani terhadap pendapatan masyarakat di desa Selebung
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pembangunan Taman Olahraga Madani terhadap pendapatan masyarakat di Desa Selebung.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni manfaat teoritis (ilmu pengetahuan) dan manfaat praktis yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait (stakeholder). Dibawah ini manfaat-manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritis

Dilihat dari aspek teori, riset ini diharapkan dapat menjadi sumbangan

pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep dan aplikasi pembangunan pada mata kuliah ekonomi pembangunan serta bidang lainnya dalam ekonomi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut:

1) Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan wawasan dan pemahaman tentang konsep dan aplikasi pembangunan dalam hal ini pembangunan desa dan dampaknya terhadap keadaan ekonomi.

2) Masyarakat

Melalui penelitian ini, peneliti berharap masyarakat mendapatkan informasi mengenai kondisi ekonomi dan penerapan pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteran masyarakat Desa Selebung khususnya dan masyarakat luas pada umumnya

3) Pemerintah Desa

Dengan adanya risetv ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat berupa referensi kepada pemerintah desa maupun sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan pembangunan desa ke depannya

4) Peneliti sejenis

Riset ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti informasi maupun referensi sebagai pembanding bagi penelitian sejenis lainnya tentang konsep pembangunan dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.